

FAKTOR PENDORONG SERUAN SOLIDARITAS VAKSIN BERKEADILAN OLEH INDONESIA PADA MASA PANDEMI

Shafira Sayyidati Azkia, Andi Purwono

Program Studi Hubungan Internasional, Universitas Wahid Hasyim Semarang

andipurwono75@gmail.com, sayyidashafira26@gmail.com

Abstrak

Riset ini bertujuan untuk mengetahui alasan mengapa Indonesia menyerukan solidaritas vaksin bagi seluruh warga dunia. Penelitian ini ditulis menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data yang diperoleh oleh penulis melalui studi pustaka, seperti buku, dokumen resmi Negara, berita dan media massa lainnya berupa kumpulan kata-kata dan bukan rangkaian angka. Penelitian ini menggunakan teori konstruktivisme dengan konsep norma. Dan hasil yang diharapkan dalam penelitian ini adalah untuk menunjukkan alasan Indonesia menyerukan solidaritas vaksin berkeadilan. Hal ini dilakukan karena didorong oleh adanya norma keadilan/ kemanusiaan.

Kata Kunci: *Pandemi Covid-19, Vaksinasi, Solidaritas Vaksin, Norma Keadilan.*

A. Pendahuluan

Tahun 2020 merupakan representasi perubahan total kebiasaan, sikap, dan aktivitas keseharian masyarakat Indonesia juga dunia. Wabah virus corona ditetapkan secara resmi sebagai pandemi global oleh *World Health Organization* (WHO) pada tanggal 11 Maret 2020. Wabah Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) muncul pertama kali pada akhir tahun 2019 di Wuhan, China. Covid-19 kemudian menyebar dengan cepat ke berbagai negara.

Virus ini masih memiliki identik dengan virus flu *Severe Acute Respiratory Syndrome* (SARS) yang pernah muncul pada 2002 dan *Middle East Respiratory Syndrome* (MERS) pada 2012. Jumlah korban yang terinfeksi virus ini terus bertambah hingga menembus 249,6 juta jiwa dengan kematian mencapai lebih dari 5 juta jiwa, per 6 November 2021. Kemunculan virus corona lebih tepatnya berada di pasar basah Wuhan dan menular melalui hewan liar. Spesifikasi hewan yang menularkan virus ini masih menjadi perdebatan sampai sekarang. Karena lokasi kemunculannya pertama kali berada di kota Wuhan, China menyebabkan virus corona juga disebut sebagai *Wuhan Virus*. Virus ini menjadi sorotan karena penyebarannya yang sangat cepat melalui gangguan pernafasan. Menurut WHO, virus corona muncul secara alami bukan disebar oleh lembaga mana pun.

Penyebab virus corona merupakan virus single stranded RNA yang berasal dari

kelompok *Coronaviridae*. Dinamakan *coronavirus* karena permukaannya yang berbentuk seperti mahkota (*crown/corona*). Namun, virus corona dari Wuhan ini merupakan virus baru yang belum pernah teridentifikasi pada manusia sebelumnya. Karena itu, virus ini juga disebut sebagai 2019 *Novel Coronavirus* atau 2019-nCoV.

Virus ini umunya ditemukan pada hewan liar seperti ular, unta, hewan ternak, kucing dan kelelawar. Manusia dapat tertular ketika adanya kontak fisik dengan hewan tersebut. Tetapi, menyebarnya coronavirus dengan cepat di Wuhan membuktikan bahwa penularan virus ini dapat melalui manusia dengan manusia. Virus bisa ditularkan lewat droplet atau partikel air yang berukuran saat kecil dan keluar saat batuk atau bersin lalu menempel pada manusia.

Meledaknya kasus ini menyebabkan Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa menghasilkan resolusi baru berjudul "*Global Solidarity to Fight Covid-19*" di Markas Besar PBB di New York, Amerika Serikat pada awal bulan April 2020 lalu. Pertemuan ini dihadiri juga oleh Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Retno P. Marsudi. Beliau turut berpendapat bahwa tidak ada satu negara pun yang kebal terhadap coronavirus dan menyebabkan tingginya angka kematian. Perlu adanya solidaritas, kesatuan dan kerja sama Internasional dalam menangani *coronavirus* ini.

Seperti negara-negara lain di seluruh dunia, wabah COVID-19 yang diumumkan pertama kali pada bulan Maret 2020 dan menjadi berkepanjangan berdampak signifikan pada sektor kesehatan dan perekonomian Indonesia. Berbagai upaya dilakukan pemerintah, baik pusat maupun daerah untuk menghentikan penyebaran virus corona di Indonesia. Sejak kasus pertama diumumkan pada Senin, 2 Maret 2020, Indonesia telah melaporkan 1.155 kasus virus corona dengan 102 kematian dan 59 pasien sembuh. Jumlah kasus yang terus bertambah membuat sejumlah daerah menerapkan kebijakan *local lockdown*, selain *physical distancing*.

Perubahan iklim yang sangat ekstrem di awal tahun 2020 juga menyebabkan peningkatan jumlah masyarakat yang terpapar virus dan semakin diperketatnya keamanan serta pertahanan masing-masing negara di dunia. Indonesia juga melakukan *lockdown* di seluruh daerah dan 33 provinsi lainnya. Langkah ini diharapkan mampu mencegah tersebarnya virus corona lebih luas lagi. Namun, hingga 2021 gelombang penyebaran virus corona belum juga mereda. Tenaga medis dan farmasi terus melakukan penelitian untuk menangani virus corona dengan menciptakan vaksin khusus.

Pada awal tahun 2021, penelitian calon vaksin corona membuahkan hasil positif. Sejumlah negara bersiap melakukan penyuntikan vaksin corona secara massal kepada

warganya. Empat negara yang telah terdaftar melakukan vaksin adalah Amerika Serikat, Jerman, Spanyol dan Inggris. Namun, kendala kembali terjadi karena sebagian besar masyarakat dunia termasuk Indonesia tidak mempercayai adanya manfaat setelah dilakukannya vaksin massal.

Meskipun sejatinya vaksin tidak sepenuhnya memusnahkan virus corona, tetapi alangkah baiknya melakukan vaksin untuk mencegah pelonjakan angka kematian virus corona. Maka dari itu, Menlu RI serukan kembali solidaritas global untuk memastikan akses vaksin covid-19 yang berkeadilan dan merata dalam Pertemuan Khusus para Menteri Dewan Ekonomi dan Sosial (ECOSOC) PBB bertema “*Vaccine for All*” yang dilaksanakan secara virtual tanggal 16 April 2021 malam.

Menlu Retno menyebutkan solidaritas global harus diperkuat agar mencapai kesetaraan akses vaksin bagi seluruh masyarakat dunia. Menlu Retno kemudian menyebutkan beberapa cara untuk mewujudkan solidaritas global itu. "Melalui peningkatan produksi, intensifikasi kerja sama transfer teknologi, termasuk melalui perjanjian lisensi yang terbuka dan transparan, penghapusan restriksi ekspor, dan mengakhiri segala bentuk politisasi vaksin," dikutip dari siaran resmi Kemlu RI.

Pandemi Covid-19 menyebar di 200 negara di dunia. Hal ini kemudian mendorong terjadinya diplomasi vaksin di antara aktor-aktor negara. Pandemi Covid-19 secara jelas mempromosikan kesadaran kolektif multilateral bahwa pandemik ini harus diselesaikan secara bersama-sama, saling bekerjasama dan gotong royong. Dari perspektif rasional, Pandemi Covid-19 juga memperlihatkan kepentingan nasional setiap negara demi mempertahankan kedaulatan sosial, keamanan dan ekonomi.

Selain itu, Indonesia juga turut berpartisipasi dalam “*Solidarity Trial*” yang dilakukan oleh Badan Kesehatan Dunia “WHO” yang bertujuan mempercepat penemuan kombinasi empat obat-obatan dan pengobatan yang paling efektif Covid-19. Disisi lain Indonesia juga aktif berpartisipasi mendorong akses yang adil bagi semua negara berkembang atas vaksin dan obat-obatan untuk virus covid-19. Semua cara ini dilakukan oleh Indonesia supaya pembengkakan angka kematian di seluruh dunia semakin berkurang sehingga bumi dapat kembali menjadi tempat berteduh yang nyaman.

B. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan penulis untuk menyelesaikan karya tulis ini adalah metode penelitian kualitatif. Hal tersebut dikarenakan data yang diperoleh oleh penulis

adalah data kualitatif yang berupa kumpulan kata-kata dan bukan rangkaian angka. Penelitian ini akan diawali dengan mengidentifikasi permasalahan dan pertanyaan penelitian yang digunakan untuk mengarahkan penelitian dalam mencari informasi secara mendalam mengenai alasan negara Indonesia menyerukan Solidaritas Vaksin Berkeadilan pada masa pandemic covid-19.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan sumber atau jenis data sekunder. Pemakaian studi literatur lebih menitikberatkan pada dokumentasi, dimana pencarian data mengenai suatu hal atau variabel didapat dari catatan, transkrip, buku surat kabar, majalah, jurnal maupun dokumen-dokumen karya ilmiah yang berkaitan dengan tema penelitian dan untuk selanjutnya dijadikan acuan (Sarlito, 2000).

C. Hasil dan Pembahasan

Alasan yang mendorong Indonesia melakukan seruan Solidaritas Vaksin Berkeadilan adalah karena adanya kewajiban untuk itu dan didasari oleh norma keadilan/kemanusiaan. Logika kepantasan berjalan bahwa di situasi krisis pandemi seperti itu, Indonesia merasa terpenggil untuk mendorong agar semua penduduk dunia bisa mendapatkan vaksin. Artinya, norma itulah yang mendorong kebijakan Indonesia untuk melakukan seruan solidaritas vaksin berkeadilan. Hal tersebut terbukti dari pernyataan- pernyataan berikut.

1. Norma Kesetaraan

Dalam konteks global, vaksinasi berkeadilan tercapai bila vaksin tersedia bagi semua orang di dunia. Negara-negara maju harus membantu negara-negara berkembang khususnya negara miskin mendapatkan vaksin. Menurut Seth Berkley, Kepala Eksekutif Gavi, Aliansi Vaksin Global, negara-negara makmur mesti membantu rakyat di negara-negara miskin memperoleh vaksin. Bahkan sebelum mereka memberikan vaksin bagi rakyat mereka sendiri. Makin cepat rakyat di pojok dunia yang menjadi ‘sarang’ pandemi covid-19 mendapatkan vaksin, kian cepat pula dunia mengakhiri situasi paling akut dari pandemi covid-19 ini.

Badan Ekonomi dan Sosial PBB (Economic and Social Council-ECOSOC) adalah salah satu dari 6 (enam) badan utama PBB yang bertanggungjawab untuk mengkoordinasikan isu ekonomi dan sosial dalam PBB. ECOSOC membawahi 15 (lima belas) badan subsider PBB, 8 (delapan) komisi fungsional, dan lima komisi regional dalam bidang ekonomi dan sosial. ECOSOC mengadakan Pertemuan Khusus yang dihadiri oleh Presiden ECOSOC dan Menlu Retno Marsudi sebagai perwakilan Indonesia.

Pertemuan dipimpin Presiden ECOSOC dan dihadiri 48 negara yang mendukung

akses vaksin berkeadilan dan merata. Presiden ECOSOC yang turut menyampaikan pidato pembukaan pada event ini adalah Direktur Jenderal Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), Presiden Majelis Umum PBB, serta Direktur Jenderal Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).

Dalam Pertemuan Khusus para Menteri Dewan Ekonomi dan Sosial (ECOSOC) Perserikatan Bangsa-Bangsa yang bertemakan “*Vaccine For All*”, Menteri Luar Negeri Indonesia, Retno Marsudi mengatakan dalam pidatonya bahwa Solidaritas global harus diperkuat untuk mendukung kesetaraan akses terhadap vaksin. Melalui peningkatan produksi, intensifikasi kerja sama transfer teknologi, termasuk melalui perjanjian lisensi yang terbuka dan transparan, penghapusan restriksi ekspor, dan mengakhiri segala bentuk politisasi vaksin. “Virus ini adalah ujian bagi solidaritas kita. Banyak resolusi dan deklarasi telah dikeluarkan. Inilah saatnya bagi kita untuk mewujudkan kata-kata kita ke dalam aksi nyata.” Imbuhnya.

Dalam pertemuan ECOSOC, Menlu Retno menggarisbawahi bahaya ketimpangan distribusi vaksin yang akan berdampak epidemiologis dan ekonomi yang sangat merugikan semua negara. Kasus Covid-19 meningkat 2 kali lipat dalam beberapa bulan terakhir dengan tingkat infeksi tertinggi yang pernah terjadi selama pandemi. Retno Marsudi mengatakan Indonesia akan menyampaikan pesan penting, antara lain mengenai memajukan kerja sama internasional dan solidaritas global bagi penanganan pandemi, baik di sektor kesehatan maupun dampak sosial-ekonomi dari pandemi tersebut. Mendorong peningkatan kinerja, serta peran PBB kemudian menyerukan pentingnya seluruh negara terus memperkuat PBB dan multilateralisme sebut Menlu Retno dalam keterangan kepada media.

Pada tanggal 12 Januari 2021 lalu, Menlu Retno terpilih menjadi Ketua Bersama *Covax AMC Engagement Group di Jenewa, Swiss. Covid-19 Vaccines Advance Market Commitment (Covax AMC)* adalah upaya yang diluncurkan oleh Gavi, Aliansi Vaksin Global, untuk memastikan setiap negara bisa memperoleh vaksin Covid-19. Hal tersebut menjadi langkah besar bagi Indonesia untuk dapat memimpin diplomasi multilateral dalam upaya penyediaan vaksin yang berkeadilan, dan mencegah tindakan monopoli oleh negara-negara tertentu. Sayangnya, hingga kini belum semua negara memiliki pandangan yang sama mengenai penyediaan vaksin yang berkeadilan.

Dalam Pertemuan Khusus Covax pada 27 Januari 2021, Menteri Luar Negeri Indonesia, Retno P.Marsudi sebagai Ketua Bersama *Covax AMC Engagement Group* memimpin pertemuan tersebut yang membahas distribusi vaksin Covid-19 ke negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah, melalui kerja sama multilateral yang dipimpin

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dan aliansi Vaksin (GAVI).

Selain Menlu Retno, pertemuan yang berlangsung secara virtual itu juga dipimpin bersama dengan Menteri Kesehatan Ethiopia, Lia Tadesse dan Menteri Pembangunan International Kanada, Karina Gould. “Seluruh negara, baik maju atau berkembang, di utara atau selatan, kecil maupun besar, berkepentingan untuk memastikan akses yang setara bagi semua vaksin,” kata Menlu Retno.

Dalam pertemuan tersebut, dibahas berbagai perkembangan terkait tata Kelola COVAX AMC untuk vaksin COVID-19 yang disediakan melalui COVAX. Pertemuan yang dihadiri oleh sekitar 400 peserta itu membahas beberapa hal penting, diantaranya indikasi alokasi vaksin bagi peserta COVAX AMC, strategi upaya penggalangan pendanaan dari para donor, jaminan akses vaksin bagi peserta COVAX AMC yang menghadapi tantangan internal, dan dorongan kepada COVAX untuk kejelasan kesiapan distribusi.

Dalam Pertemuan, Menlu Retno menyampaikan tiga prioritasnya yaitu transparansi, kepastian dan soloidaritas. Terkait transparansi, Menlu Retno sebagai Ketua Bersama COVAX AMC berkomitmen untuk menjalankan proses yang inklusif dan transparan dalam *Engagement Group*. Terkait kepastian, Menlu Retno menegaskan agar vaksin dapat siap dan distribusikan secara tepat waktu. Perlu didapat kepastian mengenai beberapa hal penting, yaitu jumlah vaksin yang tersedia, jenis vaksin yang akan diterima, jadwal pengiriman, regulasi, serta isu-isu penting lainnya.

Terkait solidaritas, ditekankan kembali bahwa untuk dapat mendukung vaksin multilateral, diperlukan solidaritas dan kerjasama internasional yang solid. “Tanpa kepastian akses akses setara terhadap vaksin bagi semua negara, dunia tidak akan mampu sepenuhnya menanggulangi pandemic” kata Retno. Melalui peran sebagai Ketua Bersama, Menlu Retno memiliki kontribusi substansial mengawal pembahasan strategi, kebijakan dan kinerja Fasilitas COVAX untuk memastikan tercapainya penyediaan pasokan dan distribusi vaksin COVID-19 secara cepat dan serentak bagi negara AMC secara gratis, aman dan efektif.

COVAX AMC merupakan mekanisme pengadaan dan akses vaksis bagi 92 negara dan ekonomi berpenghasilan rendah dan menengah. Fasilitas COVAX memiliki target pengadaan vaksin bagi 3 persen hingga 20 persen dari populasi setiap negara AMC, serta akan mendukung kesiapan negara AMC untuk melakukan rencana vaksinasi nasional. COVAX telah menjangkau pasokan vaksin bagi lebih dari 100 negara pada 6 benua di dunia. Namun demikian, masih terdapat tantangan akses dan distribusi, di mana hanya 0.2% dari vaksin tersebut yang didistribusikan ke negara-negara berpenghasilan rendah. “Kita tidak bisa membiarkan kesenjangan global ini menggagalkan perjuangan kita melawan pandemi,

terutama di tengah ancaman gelombang ketiga Covid-19,” tegas Menlu.

Sebelumnya, Badan Kesehatan Dunia (WHO) pada 23 Februari 2022 telah mengumumkan Indonesia menjadi salah satu dari lima negara bersama Bangladesh, Pakistan, Serbia, dan Vietnam, sebagai penerima transfer teknologi [vaksin](#) berbasis messenger RNA (mRNA). Menlu Retno Marsudi pada kesempatan itu mengatakan bahwa penunjukan sebagai penerima transfer teknologi vaksin berbasis mRNA sejalan dengan salah satu prioritas Presidensi G20 Indonesia yang mencantumkan upaya pemerataan daya jangkau vaksin di seluruh dunia.

Menlu Retno menjelaskan bahwa hal tersebut adalah jenis solusi yang dibutuhkan negara-negara berkembang. Solusi yang memberdayakan, solusi yang memperkuat kemandirian kami, solusi yang memungkinkan kami untuk berkontribusi pada ketahanan kesehatan global. Menlu Retno pada September 2021 juga sempat menyampaikan di hadapan forum pertemuan Dewan Aliansi Vaksin Gavi atas kesiapan Indonesia menjadi pusat produksi vaksin Covid-19 di kawasan Asia-Pasifik. Sedangkan Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mendorong pemanfaatan Presidensi G20 Indonesia untuk menjadikan Indonesia sebagai hub produksi vaksin berbasis mRNA untuk kawasan Asia Tenggara.

Pernyataan yang disampaikan oleh Menlu Retno dalam Pertemuan Khusus ECOSOC PBB bersama Presiden ECOSOC, merupakan alasan Indonesia memperjuangkan norma kesetaraan agar vaksin untuk bersama dapat tercapai. Pernyataan tersebut disampaikan pada 16 April 2021 melalui pertemuan virtual dan disiarkan langsung melalui akun Youtube Kementerian Luar Negeri Indonesia.

2. Norma Anti Diskriminasi

Melihat pesatnya penyebaran wabah virus corona dan bahaya yang ditimbulkan jika tidak segera ditangani, salah satu cara yang sangat mungkin dilakukan adalah dengan pengembangan vaksin guna memutus penyebaran virus corona. Beberapa bulan lalu, pemerintah mengupayakan *herd immunity* melalui vaksinasi. Tetapi jumlah vaksin yang tersedia sangat terbatas. Sampai akhir Juli, jumlah penduduk Indonesia yang sudah divaksin tahap kedua masih sebesar 18,3 juta jiwa (target 208,218 juta jiwa).

Hal ini menunjukkan bahwa kebutuhan vaksin masih sangat tinggi dan harus berebut dengan negara-negara lainnya. Perlindungan paten menjadi salah satu sebab terbatasnya akses dan mahalnnya harga vaksin. Perlindungan paten atau Hak Paten adalah kekayaan intelektual yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang

teknologi yang mempunyai peranan strategis dalam mendukung pembangunan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum.

Politisasi/ Monopoli dalam hak paten tentu harus ditantang dengan persaingan sehingga produksi bisa dilakukan dengan skala yang lebih besar dan luas dalam rangka menghasilkan harga yang lebih murah dan terjangkau. Dengan hak paten tentu tidak akan ada perusahaan lain yang bisa memproduksi secara generik. Pada akhirnya Monopoli HaKI disektor kesehatan akan mendorong komersialisasi secara terbuka terhadap kebutuhan dasar dalam kehidupan masyarakat.

Dalam sidang majelis umum ke-76 PBB, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyinggung politisasi dan diskriminasi vaksin Covid-19 yang masih terjadi di tengah pandemi saat menyampaikan pidato. Presiden Jokowi mengajak semua pihak untuk menyelesaikan masalah tersebut. "Kapasitas dan kecepatan antar negara dalam menangani Covid-19 termasuk dalam vaksinasi, sangat berbeda. Politisasi dan diskriminasi terhadap vaksin masih terjadi. Hal-hal ini harus kita selesaikan dengan langkah-langkah nyata," kata Presiden Jokowi.

Presiden Jokowi mengatakan masyarakat dunia saat ini menunggu jawaban dari Majelis Umum PBB terkait penanganan pandemi Covid-19. "Kapan masyarakat akan bebas dari pandemi? Kapan ekonomi akan pulih dan tumbuh secara inklusif? Bagaimana mempertahankan planet ini untuk generasi mendatang? Dan kapan dunia akan bebas dari konflik, terorisme, dan perang?" ujarnya. Lebih lanjut, Presiden Jokowi menyebut semua negara harus menata ulang arsitektur ketahanan kesehatan global. Menurutnya, diperlukan mekanisme baru untuk penggalangan sumber daya kesehatan global, baik pendanaan, vaksin, obat-obatan, peralatan medis, serta tenaga kesehatan secara cepat dan merata di seluruh negara.

Beliau menambahkan bahwa pemulihan ekonomi global hanya bisa berlangsung jika pandemi terkendali, dan antar negara bisa bekerja sama dan saling membantu untuk pemulihan ekonomi. Indonesia, bersama dengan negara berkembang lainnya, membuka pintu seluas-luasnya untuk investasi yang berkualitas, yaitu yang membuka banyak kesempatan kerja, transfer teknologi, peningkatan sumber daya manusia, dan berkelanjutan. "Diperlukan standarisasi protokol kesehatan global dalam hal aktivitas lintas batas negara, misalnya perihal kriteria vaksin, hasil tes, dan kondisi medis lainnya," katanya.

Presiden Jokowi mengatakan dalam bahasa Inggris bahwa *no country should be left behind*. Ucapan Presiden Jokowi tersebut klop dengan pandangan pakar hubungan internasional yang menilai sidang Majelis Umum PBB merupakan momentum Indonesia

untuk menyerukan keadilan distribusi vaksin Covid-19, saat negara-negara miskin sedang dilanda kekhawatiran tak mendapat jatah vaksin tersebut. Sementara, negara maju seperti Inggris bersama WHO dan lembaga internasional lainnya sedang menggodok rencana akses berkeadilan terhadap vaksin.

Selain menyerukan akses setara terhadap vaksin, Presiden Jokowi menyoroti rivalitas antarnegara saat pandemi. "Di saat seharusnya kita semua bersatu padu, bekerja sama melawan pandemi, yang justru kita lihat adalah masih terjadinya perpecahan dan rivalitas yang semakin menajam. Kita seharusnya bersatu padu, selalu menggunakan pendekatan *win-win* pada hubungan antarnegara yang saling menguntungkan," kata Jokowi.

Sebelumnya, dalam forum yang sama, Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, menyalahkan China atas penyebaran virus corona. "Kita harus meminta pertanggungjawaban negara yang melepaskan wabah ini ke dunia - China," cetus Trump. Di sisi lain, Presiden China, Xi Jinping, mengatakan negaranya tidak punya niat memulai Perang Dingin dengan negara manapun. Lebih lanjut, Presiden Jokowi mengutarakan kekhawatirannya jika rivalitas antarnegara terus terjadi saat pandemi masih melanda. "Jika perpecahan dan rivalitas terus terjadi, maka saya khawatir pijakan bagi stabilitas dan perdamaian yang lestari akan goyah atau bahkan akan sirna." ujarnya.

Pernyataan dalam Pidato Presiden Joko Widodo dalam Sidang Majelis Umum PBB Ke-76 membuktikan bahwa Indonesia sangat memperjuangkan kesetaraan vaksin sehingga distribusi vaksin menyetuh Negara-negara miskin yang kesulitan memperoleh vaksin. Dalam pidato perdananya pada sidang Majelis Umum PBB, Presiden Jokowi mengatakan vaksin akan menjadi "game changer" dalam perang melawan pandemi. "Kita harus bekerja sama untuk memastikan bahwa semua negara mendapatkan akses setara terhadap vaksin yang aman dan dengan harga terjangkau," ujarnya dalam pidato yang berlangsung secara virtual.

Indonesia, menurutnya, akan memainkan peran sebagai "bridge builder" dan bagian dari solusi. Presiden Joko Widodo menyerukan semua negara mendapat "akses yang setara" terhadap vaksin Covid-19 dalam Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB), pada Rabu, 23 September 2021.

Pernyataan yang disampaikan Presiden Joko Widodo dalam pidatonya menunjukkan bahwa masih adanya diskriminasi dalam pendistribusian vaksin bagi warga negara dunia. Presiden Joko Widodo dengan memperjuangkan norma anti diskriminasi berharap agar pendistribusian vaksin secara global dapat terwujud.

3. Norma Pemerataan

Selama pandemi Covid-19, Kementerian Luar Negeri terus menekankan kepada seluruh dunia bahwa kesetaraan vaksin sangat penting demi pemulihan bersama dan untuk kepentingan masyarakat Indonesia. Harapannya agar pendistribusian vaksin bagi seluruh masyarakat dapat berjalan dengan lancar dan merata agar pertahanan, keamanan serta ekonomi Indonesia dapat kembali seperti semula.

Menlu Retno Marsudi menekankan soal isu ketidakmerataan serta diskriminasi vaksin Covid-19. Hal ini disampaikannya dalam acara Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Peringatan 60 Tahun Gerakan Non-Blok (GNB) yang digelar di Beograd, Serbia. "Akses yang tidak sama terhadap vaksin saat ini masih terjadi," ungkap Menlu Retno dalam keterangan persnya setelah mengikuti KTT. Beliau juga berpandangan, hasil pertemuan Konferensi Asia–Afrika (KAA) tahun 1955 di Bandung atau Dasasila Bandung mengajarkan prinsip persamaan antarnegara, termasuk persamaan vaksin antarnegara.

Dalam kesempatan tersebut, Indonesia menyampaikan tiga prinsip dasar Dasa Sila Bandung yang sangat relevan diterapkan di masa pandemi saat ini. "Pertama, nilai dan prinsip persamaan antar negara," kata Retno. Ia menuturkan, prinsip ini relevan untuk kesetaraan vaksin. Retno mengatakan, akses yang tidak sama terhadap vaksin saat ini masih terjadi. Menurutnya, diskriminasi dan politisasi vaksin bahkan memperlebar ketimpangan vaksin. Hal ini menyebabkan sulitnya dunia untuk pulih bersama dari pandemi covid-19.

Menurutnya, pemerataan dan kesamaan akses terhadap vaksin menjadi ujian paling besar bagi semua negara di masa pandemi. "Dasa sila Bandung mengajarkan persamaan antara negara. Untuk itu semua negara GNB harus bergerak bersama dan menggaungkan solidaritas untuk kesetaraan akses vaksin covid-19," serunya. Kemudian, Menlu Retno menyampaikan soal nilai dan prinsip kerja sama negara-negara GNB. Ia mengatakan, rivalitas geopolitik mengancam spirit kerja sama untuk mengatasi pandemi dan tantangan dunia lainnya.

Menurutnya, Diskriminasi dan politisasi vaksin bahkan memperlebar ketimpangan vaksin dan kesulitan untuk pulih secara bersama.. Dengan demikian, Retno mengajak semua negara GNB bergerak bersama dan menggaungkan solidaritas untuk kesetaraan akses vaksin Covid-19. "Tantangan perubahan iklim yang dapat mengancam survival manusia, tidak bisa diselesaikan dengan pendekatan zero-sum," ucapnya.

Menlu Retno menegaskan, Dasa Sila Bandung meminta semua anggota GNB untuk mengedepankan kepentingan bersama dan kerja sama. "Terakhir, nilai dan prinsip penghormatan terhadap keadilan. Saya sampaikan bahwa Presiden Soekarno, salah satu

pendiri GNB pernah sampaikan bahwa 'kita tidak boleh melupakan sejarah,' pungkasnya. Menlu Retno menggarisbawahi, pentingnya sejarah GNB menjadi pengingat akan nilai, cita-cita dan prinsip GNB. Menlu Retno mengakhiri pidatonya dengan mengatakan bahwa semua negara-negara di dunia bersama-sama menjadikan semua nilai, cita-cita dan prinsip tersebut bermanfaat bagi rakyat. Bersama kita dapat membangun dunia yang lebih baik dan kuat.

Karena itu, Indonesia menyerukan kesetaraan diantara semua bangsa dalam menyikapi isu vaksin, sesuai Dasasila Bandung yang dirumuskan pada awal pembentukan GNB sebagai prinsip-prinsip hubungan dan kerja sama antara bangsa-bangsa. "Inilah mengapa GNB harus bertindak dalam persatuan dan solidaritas untuk mendorong pemerataan distribusi dan akses vaksin yang setara," tutur Menlu Retno.

Kesenjangan vaksin menjadi isu yang terus disoroti Indonesia dalam penanganan pandemi covid-19, berdasarkan data Organisasi Kesehatan Dunia bahwa dari 6 miliar dosis vaksin yang telah didistribusikan, hanya sekitar 2 persen diantaranya disalurkan ke Afrika. Pernyataan tersebut diungkapkan oleh Menlu Retno dalam Pertemuan Peringatan 60 Tahun KTT GNB di Beograd, Serbia pada Senin, 12 Oktober 2021. Beliau mengajak Negara-negara GNB untuk mewujudkan vaksinasi global dengan didorong oleh norma pemerataan.

4. Norma Anti Monopoli

Satu tahun telah berlalu sejak pandemi Covid-19 menjadi bencana dunia. Ekonomi global terpuruk, banyak negara mengalami resesi, tidak terkecuali Indonesia. Salah satu kebijakan yang wajib diperhatikan oleh pemerintah adalah diplomasi multilateral dan kerjasama pada penyelesaian akar permasalahan global saat ini, yaitu pandemi Covid-19. *Herd immunity* melalui vaksinasi menjadi kunci keberhasilan dalam mengakhiri pandemi Covid-19.

Perusahaan farmasi global jarang memublikasikan nilai investasi penelitian dan pengembangan untuk pembuatan satu vaksin baru. Tetapi, pada sisi lain, dengan hak monopoli yang dimiliki, perusahaan tersebut bisa mengontrol harga dan ketersediaannya. Hal itu tentunya tidak fair. Bila negara-negara dengan anggaran Negara yang terbatas dan jumlah penduduknya besar serupa Indonesia, adalah sebuah kemewahan memberi vaksin secara gratis kepada semua yang berhak mendapatkannya.

Pengamat Hubungan Internasional, Prof Dewi Fortuna Anwar, mengatakan kekhawatiran seluruh negara di tengah pandemi adalah mengamankan dosis vaksin untuk kebutuhan dalam negeri. "Meningat keperluan yang begitu besar, dan barang kali antara *supply* dan *demand* itu belum bisa seimbang dengan baik, ada kekhawatiran negara-negara

miskin tidak kebagian," katanya kepada BBC News Indonesia, pada Selasa 22 September 2021.

Dalam pidato virtual untuk Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Global COVID-19 II di Washington DC, Amerika Serikat, Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa Indonesia siap menjadi penghubung atau pusat produksi dan distribusi vaksin di kawasan Asia Tenggara maupun Asia-Pasifik. Presiden Jokowi mengatakan bahwa langkah menjadikan Indonesia sebagai hub produksi-distribusi vaksin, menjadi salah satu aspek penting mewujudkan pemberdayaan dalam upaya bersama membangun arsitektur kesehatan dan kesiapsiagaan dunia yang lebih kuat.

Presiden menyampaikan bahwa kapasitas kolektif harus diupayakan dengan berdasar pada kerja sama antarnegara sebagai kunci untuk meningkatkan pemberdayaan dalam proses membangun arsitektur kesehatan dan kesiapsiagaan dunia. Beberapa kerja sama yang menurut Presiden harus diperkuat adalah kolaborasi riset, transfer teknologi, dan akses ke bahan mentah.

Presiden Jokowi mengatakan bahwa tidak boleh adanya monopoli rantai pasok industri kesehatan. Diversifikasi pusat produksi obat, vaksin, alat diagnostik dan terapeutik harus dilakukan. Secara umum Presiden meyakini bahwa situasi pandemi Covid-19 belakangan yang mengalami penurunan jumlah kasus aktif nyaris di seluruh dunia harus dimanfaatkan untuk melancarkan pukulan pemungkas terhadap virus tersebut.

Hal itu bisa dilakukan dengan kolaborasi yang menjembatani tantangan-tantangan vaksinasi Covid-19 mulai dari pembiayaan, logistik, hingga sumber daya manusia. "Dengan kapasitasnya, Indonesia siap menjadi hub produksi dan distribusi vaksin di kawasan," kata Presiden Jokowi dalam pidato yang disimak secara daring melalui kanal YouTube resmi Sekretariat Presiden, Jumat, 13 Mei 2022 dini hari WIB.

Pernyataan Presiden Joko Widodo dalam pidatonya pada Pertemuan Khusus KTT GNB menyoroti beberapa isu monopoli vaksin yang dilakukan oleh Negara-negara penghasil vaskin. Beliau menyampaikan dengan didorong oleh norma anti monopoli agar politisasi vaksin dihapuskan dan akses vaksin secara global dapat terwujud.

Ringkasan bukti keberadaan norma sebagai alasan tindakan Indonesia sebagaimana paparan dia agar bisa dirangkum dalam tabel berikut.

Tabel 1. Ringkasan bukti alasan Indonesia serukan vaksin berkeadilan

Variabel Dependen	Variabel Independen	Bukti	Keterangan
----------------------	------------------------	-------	------------

Seruan Vaksin Berkeadilan	Norma Keadilan/ Kesetaraan	Pernyataan Menlu Retno Dalam Pertemuan Khusus (Ecosoc) Pbb	kemlu.go.id https://kemlu.go.id/portal/id/read/2385/berita/menlu-ri-kembali-serukan-solidaritas-global-akses-vaksin-di-pbb
		Pernyataan Presiden Ri Dalam Sidang Majelis Umum Pbb Ke-76	CNN Indonesia https://www.cnnindonesia.com/internasional/20210923054257-106-698193/jokowi-singgung-politisasi-diskriminasi-vaksin-di-sidang-pbb bbc.com https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-54252635
		Pernyataan Menlu Retno Dalam Peringatan Ke-60 Ktt Gnb	Kompas.com https://nasional.kompas.com/read/2021/10/12/09522971/kt-t-peringatan-60-tahun-gnb-menlu-ri-soroti-ketidakmerataan-akses-vaksin?page=all
		Pidato Presiden Joko Widodo Dalam Konferensi Tingkat Tinggi (Ktt) Gnb	DW.com https://www.dw.com/id/joko-wi-serukan-solidaritas-lawan-corona/a-53332709

Sumber: Diolah penulis

D. Kesimpulan

Ada beberapa faktor pendorong Indonesia menyerukan Solidaritas Vaksin Berkeadilan berupa beberapa norma, antara lain norma kesetaraan, norma anti diskriminasi, norma pemerataan, dan norma anti monopoli. Adapun seruan Indonesia tersebut didorong oleh kewajiban dan didasari norma keadilan/ kemanusiaan. Logika kepantasan berjalan bahwa di situasi krisis pandemi seperti itu, Indonesia merasa terpanggil untuk mendorong agar semua penduduk dunia bisa mendapatkan vaksin. Artinya, norma itulah yang mendorong kebijakan Indonesia untuk melakukan seruan solidaritas vaksin berkeadilan. Riset ini menunjukkan bahwa kepentingan material berpengaruh dalam mendorong

kebijakan luar negeri. Peneliti selanjutnya diharapkan bisa menggunakan teori konstruktivisme untuk melihat adakah alasan ideasional di balik pembukaan hubungan diplomatik tersebut.

Daftar Pustaka

Jurnal dan Buku

Ministry of Economic Affairs Royal Government Of Bhutan, *Bhutan Sustainable Hydropower Development Policy 2021*, diakses dari <https://www.moea.gov.bt/wp-content/uploads/2017/07/Sustainable-Hydropower-Development-Policy-2021.pdf>, pada tanggal 6 februari 2022.

National Environment Commission. 2014. *BHUTAN : Bhutan Water Vision and Bhutan Water Policy*. Diakses dari <https://policy.asiapacificenergy.org/node/2896> ,pada tanggal 15 Maret 2022.

Penjore, D., *Security of Bhutan: Walking Between the Giants*, Journal of BhutanStudies, 118-123.

Plano, J. C., & Roy O. (1968). *International Relations Dictionary*, USA. Tshering, S., & Bharat T., *Hydropower - Key to sustainable, socio-economic development of Bhutan*, diakses dari www.un.org/esa/sustdev/sdissues/energy/op/hydro_tsheringbhutan , pada tanggal 5 Maret 2022.

Uddin, S. N., & Taplin, R. (2009). *Trends in renewable energy strategy development and the role of CDM in Bangladesh*. *Energy Policy*, 37(1), 281-289. Bakry, U. S. (2016). Motode penelitian Kualitatif.

Website dan Berita Online

Agriculture in Bhutan, diakses dari <https://www.grida.no/resources/1733>, pada tanggal 2 Maret 2022.

Choden, Y., *Bhutan to have a cyber security strategy*, Bhutan Today, diakses dari <http://www.bhutantoday.bt/bhutan-to-have-a-cyber-security-strategy/> , pada tanggal 30 januari 2022.

Diakses dari <https://www.fao.org/3/V8380E/V8380E03.htm#TopOfPage>, pada tanggal 17 Maret 2022.

Diakses dari <https://reliefweb.int/report/bhutan/6-ways-bhutan-building-better-food-systems-farm-table>, pada tanggal 17 Maret 2022.

Kawilarang, Renne R.A. 2020. Bhutan Buka Hubungan Diplomatik dengan Israel, Apa Sebabnya?. https://www.viva.co.id/amp/berita/dunia/1331611-bhutan-buka-hubungan-diplomatik-dengan-israel-apa-sebabnya?page=all&utm_medium=all-page%20 . Diakses pada tanggal 21 Juli 2021.

Kuenselonline.com, (2020, 14 Desember). *Bhutan and Israel establish diplomatic ties*,

Diakses dari <https://kuenselonline.com/bhutan-and-israel-establish-diplomatic-ties/>, pada tanggal 6 Februari 2022

Lamsang, T., *Bhutan to face Security and Monitoring issues with new Entry points and SDF exempt Dzongkhags*, diakses dari <https://thebhutanese.bt/bhutan-to-face-security-and-monitoring-issues-with-new-entry-points-and-sdf-exempt-dzongkhags> , pada tanggal 27 Januari 2022.

National security Bhutan, diakses dari <http://www.country-data.com/cgi-bin/query/r-1516.html> , pada tanggal 27 Januari 2022.

Pant, H. V., & Aditya, G. S., *Threat and Perceptions in the Himalayas: The complexity of Bhutan*, diakses dari <https://www.orfonline.org/research/the-complexity-of-bhutan> , pada tanggal 27 Januari 2022.

Pernyataan Ron Malka dubes Israel untuk India dalam siaran pers kuensel diakses dari <https://kuenselonline.com/bhutan-and-israel-establish-diplomatic-ties/>, pada tanggal 6 februari 2020.

The Kingdom Of Bhutan Agriculture, diakses dari <https://sites.google.com/site/thekingdomofbhutan/agriculture> , pada tanggal 2 Maret 2022.

What we learned while developing Bhutan's first National Cybersecurity Strategy, The UN specialized agency for ICTs, 5 November 2020, diakses dari <https://www.itu.int/hub/2020/11/what-we-learned-while-developing-bhutans-first-national-cybersecurity-strategy/> , pada tanggal 29 januari 2022

